

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wonogiri memiliki keunikannya sendiri di mata masyarakat. Ada berbagai macam keunikan yang dimiliki Wonogiri, dengan ciri khas yang tidak dimiliki oleh kota lain. Hal tersebutlah yang kemudian menjadikan Wonogiri berbeda dari kota lainnya. Terlebih Wonogiri masih menjaga keindahan terbukti dari adanya tempat pariwisata lokal yang berkembang di Kabupaten Wonogiri. Terutama di bagian selatan dari pusat kota Wonogiri yang merupakan sebuah batuan gunung karst yang terdiri dari gunung dan batuan gamping. Kemudian bergeser ke sisi timur terdapat bentangan samudera yang menjadikan pariwisata lokal berupa pantai di Wonogiri. Tidak hanya itu, berjarak sekitar 8 kilometer dari pusat kota Wonogiri terdapat sebuah Waduk buatan yang dinamakan Waduk Gajah Mungkur yang merupakan mata air dari sungai Bengawan Solo.

Peningkatan potensi pariwisata di Wonogiri menghadirkan berbagai bentuk dan jenis pariwisata. Namun, tidak semua pariwisata yang ada di Kabupaten Wonogiri di kelola oleh badan pemerintah. Wonogiri juga merupakan sebuah daerah yang ada di Soloraya dengan landasan terbang dan landasan darat untuk olahraga paralayang dan gantole. Tidak hanya itu, Wonogiri kerap kali membuat sebuah program olahraga dengan berbagai kegiatan seperti pekan kejuaraan yang di khususkan untuk pemuda di Kabupaten Wonogiri. Pemerintah Kabupaten Wonogiri sangat mendukung

peningkatan potensi dan memfasilitasi SDM sehingga membentuk program kepemudaan. Program ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas daya saing SDM ekonomi kreatif, dan menyinkronisasikan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader Kabupaten/Kota. Dengan menghadirkan berbagai program seperti beasiswa, pelatihan, ataupun pekan olahraga.

Sebuah instansi yang bergerak dalam pengelolaan pemuda, olahraga dan pariwisata tersebut merupakan Dinas Pemuda, dan Olahraga, dan Pariwisata atau yang biasa dikenal dengan Dispora Wonogiri. Sebelum dibentuknya Dispora Wonogiri, urusan kepariwisataan ditangani oleh Badan Pengelola Obyek Wisata (BPOW). Pembentukan badan tersebut di atur melalui SK Bupati Tk.II Wonogiri No.Hukum 6 / 1977. Namun untuk mengakomodasi setiap variasi beban kerja dari urusan Pemerintah yang berbeda di setiap daerah maka besaran organisasi perangkat daerah tidak sama dengan perangkat daerah lain. Dari adanya argument tersebut dibentuk tipology dinas atau badan daerah sesuai dengan besarnya agar membentuk sebuah perangkat daerah agar lebih efektif dan efisien. Dengan dasar pertimbangan tersebut, pada masa pemerintahan Bupati Joko Sutopo ditetapkan peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 tahun 2016 mengenai Susunan Kedudukan dan tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, maka mulai tanggal 1 Januari 2017 dibentuk Dinas baru yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri.

Dalam sebuah Instansi pemerintah pastilah terdapat sebuah pemangku kepentingan yang berperan sebagai aktor di dalamnya. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing dengan tujuan yang sama, yaitu untuk keberhasilan organisasi tersebut. Definisi pemangku kepentingan sendiri menurut *Freeman* dan *McVea* merupakan sebuah kelompok atau juga individu yang dapat dipengaruhi maupun mempengaruhi oleh sebuah pencapaian organisasi.¹ sebuah instansi atau organisasi harus memelihara hubungan baik antar pemangku kepentingan di dalamnya demi kepentingan untuk menyediakan kebutuhan setiap pemangku kepentingan. Setiap bagian dalam sebuah organisasi atau instansi memiliki masing-masing pemangku kepentingan yang memiliki tanggung jawab dan tugas mereka masing masing. Di Dispora Wonogiri sendiri terdapat beberapa jenis pemangku kepentingan dengan identifikasi dan pemetaan bagaiannya.

Identifikasi pemangku kepentingan merupakan sebuah pengidentifikasian atau analisis dari individu, kelompok, atau organisasi yang terlibat dalam sebuah organisasi berdasarkan tugas, keterlibatan, kepentingan, pengaruh, maupun potensi yang dimiliki. Sedangkan identifikasi pemangku kepentingan dapat dibedakan berdasarkan kepemilikan yang dikaitkan dari satu, dua, atau tiga atribut yaitu *power* (kekuasaan), *legitimacy* (legitimasi),

¹ Astri Wulandari, *Mengelola Hubungan Pemangku Kepentingan dan Harapan Pemangku Kepentingan*, *Ettisal Journal of Communication*, Vol. 3, No. 2, 2018, Hal. 164.

dan *urgensi* (urgensi).² Dari ketiga atribut tersebut terbukti sangat penting dalam proses identifikasi pemangku kepentingan.

Pemetaan pemangku kepentingan merupakan sebuah rangkaian kegiatan untuk mengumpulkan data tentang pemangku kepentingan guna kepentingan pengolahan dan juga analisis data, penetapan strategi, penentuan klasifikasi pemangku kepentingan serta untuk merumuskan beberapa pendekatan dengan agenda program yang akan dilaksanakan secara bersama dengan pemangku kepentingan tersebut³. Pemetaan Pemangku kepentingan dalam definisi lain juga merupakan sebuah langkah dalam pendekatan dalam melibatkan *stakeholder*. Pemetaan juga merupakan sebuah langkah penting untuk dapat memahami siapa saja pemangku kepentingan utama, dari mana mereka berasal, dan apa yang mereka cari dalam hubungan sebuah organisasi.⁴

Dalam pemetaan pemangku kepentingan nanti, akan diidentifikasi dan di analisis bagaimana pengaruh, ketersediaan, legitimasi perlunya pelibatan dari setiap pemangku kepentingan. Maka, akan terlihat yang mana pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh *high*, atau medium, bahkan juga *low*. Pemetaan juga bertujuan untuk mengetahui mana pemangku kepentingan yang memiliki kontribusi besar, pengaruh besar, ketersediaan juga besar. Adanya identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan ini merupakan sebuah bagian dari seorang *Public Relations* atau Humas dimana humas tidak

² Astri Wulandari, *Komunikasi Pemangku Kepentingan*, Sedayu Sukses Makmur, 2020

³ 'Building human resources instead of landfills' 2012, *Pedoman Umum pemetaan Pemangku Kepentingan di Lingkungan Instansi Pemerintah*, no 336, hal. 6.

⁴ Astri Wulandari, *Komunikasi Pemangku Kepentingan*, Sedayu Sukses Makmur, 2020, hal. 51

hanya menjalin relasinya dengan media namun tugasnya juga termasuk dalam menjalin relasi dengan setiap pemangku kepentingan yang ada di sebuah organisasi atau instansi pemerintah. Setiap pemangku kepentingan harus memiliki komunikasi yang baik dalam keterlibatannya agar program dari organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya.

Dispora Kabupaten Wonogiri merupakan sebuah Instansi Pemerintah yang memiliki pemangku kepentingan di dalamnya yang berperan sebagai aktor untuk menjalankan tugas dan perannya masing-masing demi keberlangsungan dan tujuan yang sama untuk Instansi Dispora. Adanya identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan dimaksudkan bertujuan untuk mengetahui siapa *stakeholder* utama untuk kemajuan mewujudkan pemuda yang berkarakter, olahraga yang berprestasi dengan dukungan kepariwisataan yang inovatif dan kreatif. Selain hal tersebut, yang menjadikan penelitian ini menarik yaitu di Dispora Kabupaten Wonogiri juga belum terdapat penelitian lain yang berfokus pada identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan. Sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan dengan tujuan mengetahui pemangku kepentingan mana yang paling utama, atau pemangku kepentingan mana yang membutuhkan perhatian. Proses dari pemetaan pemangku kepentingan tersebut sama pentingnya dengan hasil, dan juga kualitas proses sangat tergantung pada pengetahuan pihak yang berpartisipasi di dalamnya. Serta mengidentifikasikan aktor pemangku kepentingan berdasarkan jenis dari pemangku kepentingan.

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan

Identifikasi dan Pemetaan Pemangku Kepentingan di Dispora Kabupaten Wonogiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, rumusan masalah yang akan menjadi bahan dari penelitian ini adalah, “*Bagaimana Identifikasi dan Pemetaan Pemangku Kepentingan di Dinas Pemuda, dan Olahraga, dan Pariwisata di Kabupaten Wonogiri?*”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di rumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana pengidentifikasian dan pemetaan pemangku kepentingan di Dispora Kabupaten Wonogiri.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat dari penelitian ini adalah, sebagai sebuah pengembangan Ilmu Komunikasi khususnya dalam bidang *Publik Relations*. Selain itu juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mendalami penelitian yang bersangkutan dengan Komunikasi Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Communication*).

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu, dapat menjadi bahan masukan dan juga evaluasi bagi Dispora Kabupaten maupun Pemerintah Wonogiri dalam kegiatan Identifikasi dan Pemetaan Pemangku Kepentingan.

1.5 Metodeologi Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi. Menurut *Strauss* dan *Corbin* penelitian kualitatif adalah sebuah jenis penelitian yang temuannya tidak hanya di dapatkan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan. Meskipun data dalam penelitian ini dapat di hitung dan dapat di sampaikan dalam angka-angka sebagai entuk analisis data yang bersifat kualitatif. Penelitian ini menunjuk pada analisis data non-sistematis. Prosedur penelitian ini menghasilkan hasil yang dapat diperoleh melalui data yang telah di kumpulkan dengan sarana yang beragam, antara lain wawancara, pengamatan, dokumen, atau juga arsip dan tes. Pendekatan Kualitatif tersebut di anggap sangat cocok dengan penelitian ini karena di anggap dapat melukiskan kondisi obyek yang di amati secara nyata dan apa adanya tanpa manipulasi. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi situasi dan lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.

Sedangkan pendekatan Fenomenologi merupakan sebuah pendekatan dalam penelitian yang tidak menggunakan dugaan atau hipotesis sementara saat proses analisisnya. Dalam menggunakan pendekatan ini, teknik analisis data digunakan untuk mengetahui kesamaan makna untuk menjadi sebuah konsep. Dimana fenomena tersebut terjadi kepada seorang individu atau kelompok yang di alami secara sadar dalam hidupnya. Menurut *Creswell* dari buku Sugiyono, pendekatan Fenomenologi dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah pemahaman atau menjabarkan

dan menjelaskan sebuah arti dari peristiwa yang dialami individu atau kelompok. Yang mana, secara singkat maksud dari pendekatan Fenomenologi adalah pendekatan yang dapat digunakan untuk mengungkapkan sebuah peristiwa dan pengalaman secara nyata.

Tujuan dari penelitian dengan pendekatan Fenomenologi adalah untuk mengamati pengalaman individu maupun kelompok terhadap sebuah fenomena atau peristiwa dalam bentuk deskripsi untuk menjelaskan peristiwa tersebut.⁵

1.5.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sebuah sumber atau seseorang yang memiliki informasi dan kompeten dalam bidangnya untuk dapat dimintai informasi terkait dengan penelitian. Terdapat beberapa subjek dalam penelitian ini yakni, Kepala Sekdin Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala bagian UPTD, Pegawai bagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Pegawai Sub Bagian Pora, Pegawai bagian Parekraf, pelaku usaha, masyarakat lokal. Subjek-subjek tersebut merupakan subjek yang relevan karena pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan komunikasi pemangku kepentingan memahami pemetaan setiap aktor pemangku kepentingan yang terlibat di Dispora.

⁵ Suyanto, Fenomenologi Sebagai Metode Dalam Penelitian Pertunjukan Teater Musikal, Vol. 16, No. 1, 2019, Hal. 27.

1.5.3 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sebuah permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi sasaran dalam penelitian ini yaitu Identifikasi dan Pemetaan Pemangku Kepentingan di Dispora Kabupaten Wonogiri. Hal tersebut berkaitan satu sama lain dan menjadi sebuah tugas yang harus dijalani oleh Dispora Wonogiri.

1.6 Jenis Data

Data primer dibutuhkan untuk menjadi data utama yang didapat secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini menggunakan data hasil wawancara kepada pihak yang kompeten dibidangnya dan memiliki informasi yang relevan dengan topik penelitian dan juga melaksanakan observasi langsung. Kemudian untuk data sekunder, yaitu data tambahan yang diambil tidak langsung dari lapangan akan tetapi dapat diambil dari dokumen dan foto-foto yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

1.7.1 Teknik Wawancara

Teknik Wawancara adalah bentuk komunikasi secara verbal yang terjadi berupa percakapan yang kemudian bertujuan untuk memperoleh informasi atau dapat diartikan sebagai sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dan obyek peneliti. Dalam teknik ini kreatifitas pewawancara sangat diperlukan karena dapat mempengaruhi hasil wawancara dan juga dapat menafsirkan setiap

jawaban yang diperlukan dalam penelitian.⁶ Wawancara ini dilakukan dengan topik penelitian kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri dan juga kepala UPTD. Sehingga informasi yang di dapat lebih lengkap dan jelas.

1.7.2 Teknik Observasi

Teknik Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan sistematis dan disengaja melalui sebuah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang di selidiki.⁷ Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan sebuah hasil dari pengamatan penelitian di lapangan. Kemudian, hasil dari pengamatan tersebut dapat menjadi sebuah kesimpulan topik terkait permasalahan yang diteliti yaitu tentang Identifikasi dan Pemetaan Pemangku Kepentingan di Dispora Kabupaten Wonogiri.

1.7.3 Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi merupakan bentuk pengumpulan data berupa dokumen, foto-foto berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Teknik Dokumentasi dapat menjadi catatan peristiwa yang sudah berlalu untuk dapat di dokumentasikan dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang.⁸ Dokumen yang dapat di analisis dalam teknik ini yaitu, dokumen yang dimiliki Dispora

⁶ Abdussamad, *Metode Penelitian kualitatif*, Makassar, 2012, Hal. 143

⁷ Ibid. Hal, 147

⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian kualitatif*, Makassar, 2021, Hal. 149

Kabupaten Wonogiri berupa foto, arsip maupun video yang relevan dengan topik penelitian yang di angkat, sehingga data tersebut dapat menjadi pelengkap untuk data sebelumnya yang di dapatkan untuk penelitian ini.

1.8 Teknik Analisis Data

Model analisis data dari penelitian ini adalah Analisis interaktif dari *Miles and Huberman*. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan bentuk siklus antara komponen, kemudian data yang sudah di peroleh di komparasikan dengan data lain secara berkelanjutan. Tiga Komponen dalam analisis interaktif , yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.⁹

1.8.1 Reduksi Data

Komponen pertama dalam analisis data kualitatif yaitu reduksi data. Dalam komponen ini, dilakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian pada objek, penyederhanaan, dan kemudian memperjelas dengan memotong bagian yang tidak penting sehingga dapat memperoleh data yang mudah di pahami dan mengarah pada simpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Proses dari reduksi data ini akan dilakukan terus menerus selama proses penelitian masih berlangsung dan penelitan dimulai sejak pemilihan kasus yang dikaji.¹⁰

⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian pendidikan Bahasa*, Surakarta, 11. 2014, Hal. 173

¹⁰ Ibid, Hal. 174

1.8.2 Sajian Data

Dalam analisis ini, sajian data merupakan penarikan kesimpulan informasi yang diperoleh saat reduksi data yang kemudian ditarik kesimpulannya. Sajian data dapat dilengkapi dalam bentuk gambar, table, skema, bagan, atau ilustrasi. Sajian data dapat berupa informasi dalam bentuk deskriptif mengenai organisasi yang disajikan menggunakan bahasa yang logis, sistematis, dan mudah untuk dipahami. ¹¹

1.8.3 Penarikan kesimpulan

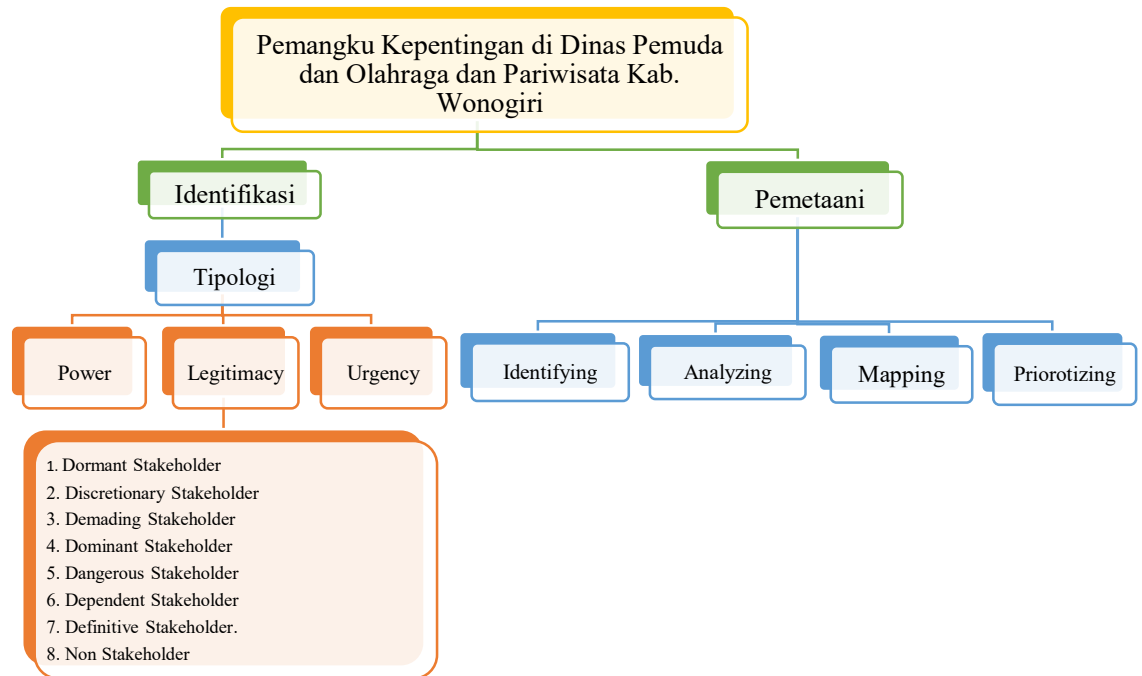
Penarikan kesimpulan dalam analisis ini harus dilakukan secara singkat, lugas, dan jelas agar dapat dipahami dengan baik. Kesimpulan harus sesuai pada topik dan juga judul dari penelitian, tujuan penelitian, pemecahan permasalahan, data penelitian, temuan dan hasil penelitian, dan teori yang relevan. ¹²

¹¹ Ibid, Hal,175

¹² Ibid, Hal. 176

1.9 Kerangka Konsep, Definisi Konsep, dan Definisi Operasional.

1.9.1 Kerangka Konsep



(Gambar 1 Peta Konsep)

1.9.2 Definisi Konsep

A. Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan atau *Stakeholder* merupakan sebuah kelompok yang cakupannya sangat luas dan memiliki keberagaman. Ada yang mendukung dan juga bermanfaat, namun ada pula yang dapat memberikan pengaruh negatif dan obstructif, dimana tergantung pada aspirasi dan kebutuhan yang berbeda.¹³ Menurut *Freeman* dalam (*Bonnafous Boucher dan Pesqueux*) mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai sebuah kelompok individu yang dapat memengaruhi atau juga dapat dipengaruhi oleh sebuah pencapaian tujuan sebuah organisasi.¹⁴

¹³ Wulandari, 2020, *Komunikasi Pemangku Kepentingan*, Sedayu Sukses Makmur, Hal. 1

¹⁴ Ibid, Hal. 1

B. Identifikasi Pemangku Kepentingan

Identifikasi Pemangku Kepentingan dimaksudkan sebagai sebuah identifikasi dari beragamnya kelas *Stakeholder* berdasarkan kepemilikan yang dikaitkan dari satu, dua, tiga atribut, yakni *Power*, *Legitimacy*, dan *Urgency*.¹⁵

C. Pemetaan Pemangku Kepentingan

Pemetaan Pemangku Kepentingan merupakan latihan visual dan alat analisis yang dapat digunakan untuk menentukan lebih lanjut mengenai pemangku kepentingan atau *Stakeholder* mana yang berguna dan penting untuk dilihat.¹⁶

1.9.3 Definisi Operasional

NO	KERANGKA KONSEP	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Dispora	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri merupakan sebuah instansi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Olahraga, SDM Pemuda, dan Pariwisata. Di setiap organisasi pasti memiliki aktor pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan mereka masing-masing. Sama halnya dengan Dispora Wonogiri yang memiliki Stakeholder atau Pemangku Kepentingan di setiap bidang kerja yang bertugas demi kemajuan instansi.

¹⁵ Ibid, Hal. 9

¹⁶ Ibid, Hal. 54

		Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas mereka masing-masing, baik dalam bidang olahraga, pemuda, maupun pariwisata yang tergabung dalam satu lingkup organisasi yaitu Dispora.
2.	Identifikasi Pemangku Kepentingan	Identifikasi Pemangku Kepentingan merupakan sebuah proses pengidentifikasian dan pengelompokan setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam sebuah organisasi. Di Dispora Wonogiri, identifikasi pemangku kepentingan dapat dikaitkan dari satu, dua, ketiga atribur yaitu <i>Power</i> , <i>Legitimacy</i> , <i>Urgency</i> . Identifikasi pemangku kepentingan membutuhkan ketiga atribut tersebut .
3.	Tipologi Pemangku Kepentingan	Tipologi Pemangku Kepentingan memiliki tiga atribut penting untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan. Yang pertama kekuatan (<i>Power</i>), Legitimasi (<i>Legitimacy</i>), dan Urgensi (<i>Urgency</i>). Beragamnya kelas pemangku kepentingan dapat diidentifikasi berdasarkan kepemilikan yang dikaitkan antar atribut. Di Dispora Wonogiri, tipologi akan digunakan untuk mengidentifikasi setiap

		<p>pemangku kepentingan yang terlibat. Sehingga dengan menggunakan tiga aribut tersebut, pemangku kepentingan dapat di petakkan sesuai dengan jenis jenisnya.</p>
4.	<i>Power</i>	<p><i>Power</i> atau kekuasaan merupakan sebuah hubungan sosial antar pemangku kepentingan yang memiliki wewenang dan hak untuk melaksanakan keinginannya sendiri meskipun ada perlawanan. Dalam sebuah instansi kedinasan, terdapat beberapa pemangku kepentingan yang memiliki kekuasaan untuk mengelola instansi lain yang berdiri di bawahnya. Sebuah Dinas di Instansi Pemerintah memiliki beragam jenis sesuai dengan kriteria tugas dan tanggung jawab, akan tetapi tidak semuanya memiliki kekuasaan untuk memaksakan kehendak. <i>Power</i> ini dapat diliht dari kualitas sumber dayanya, keuangan, kekuatan, dan pengakuan.</p>
5.	<i>Legitimacy</i>	<p>Legitimasi merupakan bagaimana pemangku kepentingan dapat mengetahui ‘apa yang harus mereka lakukan?’ dan ‘siapa yang harus diperhatikan ketika mengambil keputusan?’ Dalam sebuah instansi pemerintah, dibagi</p>

		<p>beberapa dinas terkait yang di khususkan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing. Dalam hal ini, legitimasi membantu untuk mengetahui tugas dan posisi setiap pemangku kepentingan itu sendiri. Apakah kontribusi dan peran tersebut penting, sehingga dapat memberikan pengaruh yang kuat untuk pemangku kepentingan tersebut memiliki klaim sah sebagai pemangku kepentingan dalam pelibatangannya.</p>
6.	<i>Urgency</i>	<p>Urgensi hanya ada ketika dalam sebuah kondisi apabila sebuah hubungan di anggap penting oleh pemangku kepentingan. Urgensi memiliki dua dasar atribut yang pertama yaitu, sensitivitas waktu ‘Sejauh mana hubungan tidak dapat diterima oleh pemangku kepentingan?’ yang kedua, kekritisian ‘Pentingnya hubungan dengan pemangku kepentingan?’. Urgensi merupakan sejauh mana tuntutan tiap pemangku kepentingan menuntut perhatian dengan segera. Dimana Dispora sendiri memiliki pemangku kepentingan yang pastinya memiliki urgensi</p>

		untuk hubungannya dengan pemangku kepentingan lain.
7.	Pemetaan Pemangku Kepentingan	Pemetaan Pemangku Kepentingan merupakan sebuah langkah untuk dapat memahami pemangku kepentingan yang terlibat dalam hubungan bisnis, dan memiliki peran penting atau peran utama dalam sebuah organisasi. Di Dispora Wonogiri pemangku kepentingan dapat di petakkan menggunakan empat tahapan, yaitu <i>identifying, analyzing, mapping, prioritizing</i> . Proses pemetaan pemangku kepentingan sama pentingnya dengan hasil akhir dan kualitas dari proses tersebut tergantung pada setiap aktor pemangku kepentingan yang terlibat.
8.	<i>Identifying</i>	Pada tahap ini, pemangku kepentingan yang terlibat merupakan daftar kelompok, organisasi, dan masyarakat yang relevan. Dari Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Wonogiri kelompok pemangku kepentingan yang mungkin terlibat yaitu komunitas, organisasi seperti dinas dan lembaga lain (UPTD, KESBANGPOL, BAPEDA. Kemudian untuk masyarakat yang relevan

		seperti perwakilan kelompok paguyuban masyarakat ataupun pedagang UMKM.
9.	<i>Analyzing</i>	Pada tahap <i>Analyzing</i> ini merupakan sebuah hasil dari analisis yang dilakukan melalui wawancara dengan masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat. Seperti, di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonogiri sendiri, pada tahap ini digunakan untuk memahami perspektif dan relevansi setiap pemangku kepentingan yang terlibat. (Kerjasama yang terjalin antar pemangku kepentingan? Atau laporan sumber dana yang digunakan pemerintah daerah?).
10.	<i>Mapping</i>	<i>Mapping</i> merupakan tahapan dari pemetaan pemangku kepentingan yang ke tiga. Pada tahapan ini digunakan untuk dapat memvisualisasikan sebuah hubungan dengan tujuan antar pemangku kepentingan yang terlibat. Di Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri sendiri Mapping akan digunakan sebagai tahap menggambarkan peristiwa dan hubungan yang terjadi antar pemangku kepentingan secara nyata dan alami.

11.	<i>Prioritizing</i>	<p>Tahap Prioritizing ini merupakan tahapan dari pemetaan pemangku kepentingan yang keempat. Yang mana maksud dari tahap ini yaitu untuk memberikan peringkat setiap pemangku kepentingan berdasarkan ketentuan dan pengelompokannya serta mengidentifikasi masalah. Di Dispora Wonogiri sendiri, <i>Prioritizing</i> digunakan untuk mengelompokkan setiap pemangku kepentingan yang terlibat berdasarkan kepentingan setelah diidentifikasi lebih lanjut. Seperti ‘Siapa yang akan menjadi pemangku kepentingan Devinitife?’ Setelah diidentifikasi berdasarkan jenis-jenis pemangku kepentingan.</p>
-----	---------------------	---

(Tabel 1 Definisi Operasional)